

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Dilihat dari struktur kependudukannya, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar. Hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 mencatat, jumlah penduduk Indonesia mencapai 254,9 juta jiwa. Dilihat dari aspek etnis, Indonesia termasuk negara yang sangat multi etnik dengan 1340 etnik yang tersebar dari Sabang di Aceh, sampai Merauke di Papua. Demikian pula dari aspek agama dan kepercayaan, Indonesia termasuk masyarakat yang sangat multi religius, dengan enam agama resmi, Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu, dan masih banyak sistem kepercayaan yang berkembang dan menjadi sempalan dari berbagai agama yang ada, tapi tidak bisa menyatu dalam agama besarnya, kendati belum memperoleh pengakuan negara.

Dilihat dari kemampuan ekonomi, Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumbangan GDP (Gross Domestic Product) terbesar ke-10 di dunia. Dengan demikian, Indonesia termasuk salah satu dari 10 negara kaya. Akan tetapi, kemiskinan masih cukup tinggi dengan 11.25% dari total populasi nasional hasil perhitungan BPS tahun 2014. Dengan demikian, persoalannya kemudian adalah distribusi dan pemerataan. Dan sampai kini negara belum memiliki sistem bagaimana mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat miskin kecuali dengan bekerja, dan untuk bekerja diperlukan skill dan ketrampilan.

Bila didekatkan kemiskinan dan pendidikan, akan menjadi sebuah ancaman, karena keterlambatan memperbaiki sektor pendidikan akan berakibat langsung pada perekonomian bangsa, khususnya kemampuan ekonomi keluarga. Dan Indonesia merupakan negara yang sangat sensitif dengan pendidikan keagamaan, karena berkembang di desa-desa, dan bahkan berkembang pendidikan keagamaan tradisional di kantong-kantong kemiskinan, sehingga seringkali agama dijadikan pembenaran terhadap aksi-aksi perlawanan terhadap kekuasaan atau yang menguasai sektor ekonomi, karena ketidakberdayaan mereka untuk menjangkau apa yang ada dalam imajinasinya.

Pendidikan tidak hanya tentang transfer ilmu pengetahuan, mengubah ketidaktahuan menjadi berpengetahuan. Namun pendidikan juga meliputi aspek karakter dan keterampilan. Karena sejatinya pendidikan adalah upaya membentuk peserta didik menjadi manusia paripurna, yakni manusia yang bertaqwa, mandiri dan cendekia. Oleh karena itu pendidikan yang ideal tidaklah cukup hanya dengan aktivitas ceramah, tugas-tugas dan ujian rutin. Tetapi perlu diperlukan sebuah formulasi pendidikan yang mampu membentuk karakter manusia yang siap bersaing, di samping memiliki profesionalitas dalam bidang yang digelutinya kelak.

Tuntutan untuk mencari konsep pendidikan ideal bagi Indonesia menjadi semakin penting jika melihat bagaimana kondisi pendidikan Indonesia dan generasi mudanya saat ini. Arus globalisasi yang begitu pesat telah membawa ideologi-ideologi asing yang bertentangan dengan nilai-nilai peradaban bangsa Indonesia dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali aspek pendidikan. Sehingga sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia pun tidak sepenuhnya sesuai dengan karakter dan budaya Indonesia. Hal ini membuat pendidikan Indonesia tidak memiliki karakter yang kuat dan justru terombang-ambing mengikuti arus perubahan. Dampaknya adalah tidak terbentuknya karakter masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Indonesia.

Kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia semakin lama semakin terkikis dengan banyaknya serbuan budaya asing yang masuk di kehidupan masyarakat. Kesemuanya ini merupakan implikasi atas perkembangan teknologi informasi yang berlangsung di era globalisasi. Saat ini, informasi dari berbagai penjuru dunia dengan mudah dapat diakses bahkan dengan jari dan tanpa batas. Informasi yang disajikan tidak seluruhnya sejalan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga ketidakmampuan dalam menyaring budaya luar dan informasi yang masuk, semakin mendekatkan masyarakat Indonesia pada konsep "*global village*" (Hendrastomo, 2007, hlm. 6). Persebaran global yang dinamakan dengan globalisasi ini pun berimplikasi langsung terhadap semangat nasionalisme kebangsaan yang ada dalam diri masyarakat. Tantangan terhadap nasionalisme muncul selaras dengan semakin majunya kehidupan manusia.

Untuk mengatasi penurunan rasa nasionalisme masyarakat Indonesia, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan dan Kementerian serta Lembaga Pemerintah (Kemendikbud, Kemendagri, Kemenakertrans, Kemenkopolkum, Lembaga Pertahanan Nasional, Badan Nasional Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia serta Kementerian Luar Negeri) menyelenggarakan pendidikan dan/atau Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN). PKBN merupakan upaya yang terencana untuk menanamkan nilai-nilai bela negara pada diri warga Negara Indonesia, yaitu kecintaan akan tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Hasil yang diharapkan dari PKBN adalah warga Negara yang sadar hak dan kewajibannya untuk membela negara, mampu menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.

PKBN sebagai perwujudan pasal 9 ayat (1) dari UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945, merupakan bentuk kebijakan yang ditujukan untuk warga negara Indonesia, dengan tujuan meningkatkan semangat nasionalisme dan patriotisme. Kesadaran bela negara adalah hal yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia.

Bela negara kini memasuki dua konsep pertahanan dan ketahanan nasional Indonesia. Pertahanan merupakan ranahnya TNI-POLRI yang terlatih secara profesional, dan masyarakat harus berpartisipasi untuk menangkal dan mencegahnya, sementara ketahanan merupakan kewajiban bersama seluruh rakyat Indonesia, untuk memperkuat ketahanan nasional dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya (IPOLEKSOSBUD). Untuk kepentingan inilah, bangsa Indonesia harus diperkuat karakter kebangsaannya, sehingga terus bersama-sama memajukan bangsa dalam peningkatan ekonominya, dengan kapasitas dan kompetensinya masing-masing.

Ketahanan Nasional menurut Sutarman (2011) adalah kondisi yang dinamis yang merupakan integrasi dan kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, didalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, baik dalam maupun dari luar negeri yang langsung maupun tidak

langsung membahayakan identitas, keutuhan, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta dalam mencapai tujuan nasionalnya. Kemudian, Presiden Joko Widodo (2014) dalam pidato beliau pada acara Peringatan Hari Bela Negara menegaskan bahwa bela negara memiliki spektrum yang sangat luas di berbagai bidang kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, sosial dan budaya. Bela negara bisa dilakukan oleh setiap warga negara dari berbagai latar belakang profesi: mulai dari petani, buruh, professional sampai dengan pedagang. Bela negara bisa diwujudkan dalam kehidupan -hari sesuai peran dan profesi warga negara.

Dengan demikian, bela negara untuk memperkuat ketahanan nasional harus didiversifikasi tidak sekedar dalam pengertian pertahanan negara, tapi juga ketahanan dalam pancagatra ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, yang harus dimotori oleh inovasi dan kreatifitas bangsa untuk membina dan membangun bangsa untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia, memiliki stabilitas ideologi dan politik serta memiliki ketahanan sosial dan budaya, dengan membina basis filosofi bangsa *harmony in diversity*.

Ketahanan nasional juga harus siap menghadapi tantangan yang muncul dari luar, karena Indonesia tidak sendirian di dunia ini, tapi berdampingan dengan negara-negara serumpun di ASEAN, dan juga berdampingan dengan negara-negara Asia Pasifik, yang kemajuan dan perubahan di negara-negara tersebut, akan berakibat langsung pada Indonesia. Dengan demikian, ketahanan Nasional Indonesia akan sangat ditentukan oleh ketahanan dalam semua astagatranya, tidak hanya panca gatra dari gatra sosial ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, tapi juga ketahanan aspek gatra demografi, geografi dan sumber daya alam.

Penyelenggaraan program kegiatan PKBN oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, selama ini belum terpadu dan sinergi sehingga hasilnya belum optimal. Faktor lain yang menjadi hambatan kegiatan PKBN antara lain belum adanya perangkat system terpadu dalam perencanaan, terbatasnya sarana dan prasarana PKBN serta belum terpenuhinya jumlah dan kualitas SDM pembimbing/kader PKBN dalam memberikan pendidikan maupun sosialisasi PKBN. Sehingga masyarakat Indonesia belum memahami secara menyeluruh hak dan kewajibannya dalam pembelaan terhadap bangsa dan negara.

Jumlah dan kualitas SDM pembimbing/kader PKBN dirasa masih belum memadai ditinjau dari segi jumlah dan kualitasnya. SDM pembimbing atau kader bela negara disiapkan mayoritas dari kalangan sipil bukan militer.

Mereka merupakan para pendidik yang berasal dari instansi pemerintah dan para cendekiawan. Selain itu alumni pelatihan angkatan pertama yang telah lulus menjalani program selanjutnya akan direkrut menjadi pembina dan pelatih untuk angkatan berikutnya. Kader bela negara angkatan pertama terdiri dari tiga komponen, yakni lingkungan pendidikan, kerja dan permukiman.

Pada hakikatnya SDM pertahanan adalah seluruh lapisan masyarakat Indonesia karena merekalah unsur terpenting yang menentukan terlaksananya sistem pertahanan semesta yang dianut NKRI. Hal ini dikarenakan bahwa segala upaya mempertahankan tegaknya dan kedaulatan NKRI menjadi hak dan kewajiban seluruh masyarakat. Namun dalam pelaksanaan bela negara saat ini, SDM pembimbing/kader PKBN belum memiliki kualifikasi yang jelas seperti belum adanya tingkat pendidikan minimal atau persyaratan lainnya seperti ToT atau diklat yang dikhususkan bagi calon SDM pembimbing/kader bela negara. SDM pembimbing/kader PKBN biasa disebut juga Pelatih Inti Bela Negara ini berasal dari berbagai komponen masyarakat dan dari berbagai profesi serta latar belakang. Mereka yang telah secara sukarela mengikuti Diklat Pelatih Inti Bela Negara, telah dilatih dan dibekali dengan berbagai kemampuan dan keterampilan sebagai Kader Bela Negara. Pelatih inti bela negara inilah yang nantinya akan mampu menyebarluaskan nilai-nilai Bela Negara kepada masyarakat di wilayah masing-masing serta di lingkungan tugas dan pekerjaannya.

Hal-hal yang diajarkan PKBN antara lain menyangkut cinta Tanah Air, kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai dasar negara, dan kearifan lokal. Terdapat kurikulum yang akan diterapkan, hanya saja akan ada perbedaan menyangkut kearifan lokal mengingat budaya suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Selanjutnya, ada materi bidang pendukung atau outbound tujuannya untuk membangun jiwa kepemimpinan, kebersamaan, intelektualitas dan jiwa korsa kebersamaannya.

Rasa cinta tanah air terlihat semakin memudar pada sebagian masyarakat Indonesia. Bagi segelintir orang mereka terkadang gengsi untuk menggunakan

barang yang dibuat di Indonesia. Ada rasa kepuasan tersendiri, ketika memakai produk luar negeri. Istilah seperti *Made in America* atau *Made in China* bukan menjadi hal tabu lagi di tengah-tengah masyarakat. Mulai dari anak muda hingga dewasa, di zaman modern ini, mereka lebih suka memakai produk luar negeri. Mereka rela mengeluarkan uang lebih banyak, supaya bisa mendapatkan produk bermerk yang mereka impikan selama ini. Bahkan, mereka rela menyampingkan kebutuhan pokok, seperti seragam sekolah, atau buku sekolah, dan lebih mengutamakan untuk membeli produk-produk tersebut.

Kearifan lokal merupakan suatu bentuk warisan budaya Indonesia yang telah berkembang sejak lama. Kearifan lokal lahir dari pemikiran dan nilai yang diyakini suatu masyarakat terhadap alam dan lingkungannya. Di dalam kearifan lokal terkandung nilai-nilai, norma-norma, sistem kepercayaan, dan ide-ide masyarakat setempat. Oleh karena itu kearifan lokal di setiap daerah berbeda-beda. Namun, dewasa ini kearifan lokal menghadapi tantangan-tantangan yang mengancam keberadaan dan kelestariannya. Kearifan lokal yang telah terbentuk sejak lama kini mulai terkikis seiring berkembangnya teknologi diikuti meningkatnya proses adopsi inovasi serta difusi adopsi teknologi. Suhartini (2009) menyatakan bahwa kearifan lokal-kearifan lokal ikut berperan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungannya. Namun demikian kearifan lokal juga tidak lepas dari berbagai tantangan seperti: bertambah terusnya jumlah penduduk, teknologi modern dan budaya, modal besar serta kemiskinan dan kesenjangan.

Selain kurikulum diperlukan juga kesiapan sarana dan prasarana penunjang agar pelaksanaan PKBN dapat berjalan dengan optimal. PKBN harus dapat menjadi salah satu sarana yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai bela negara bagi seluruh warga negara Indonesia. Melalui penyelenggaraan PKBN diharapkan dapat terbentuk sikap mental dan karakter bela negara yang terukur dari aspek pemahaman dan kemauan warga negara untuk mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara. Penilaian yang obyektif dan terukur atas keberhasilan penyelenggaraan PKBN yang optimal yaitu sikap mental dan karakter yang diperlukan untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

Melihat adanya perbedaan latar belakang peserta, masih terbatasnya sarana dan prasarana serta kualitas SDM tenaga pendidik atau pelatih bela negara, penulis melakukan penelitian untuk menilai kualitas SDM pendidikan kesadaran bela negara. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan sistem dinamis untuk memodelkan, menganalisa dan melakukan simulasi sistem guna mengetahui faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kualitas SDM pendidikan kesadaran bela negara.

## **I.2 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis membatasi penelitian ini pada kualitas SDM pendidikan bela negara. Kualitas SDM pendidikan Bela Negara dengan sistem dinamik ini dibatasi pada prediksi kualitas SDM pendidikan bela negara pada kurun waktu sepuluh tahun ke depan. Tujuan analisis kualitas SDM pendidikan bela negara yakni untuk mengukur tingkat keberhasilan SDM yang menyelenggarakan kegiatan PKBN secara terpadu dan sinergis, pengembangan cara pandang atau kurikulum yang sama dari SDM Pemberi materi pada penyelenggaraan PKBN, serta kompetensi SDM pembimbing/kader PKBN di Lingkungan Pendidikan, Lingkungan Pekerjaan dan Lingkungan Permukiman yang telah mengikuti PKBN, pada 5 (lima) wilayah yang menjadi lokus penelitian yaitu: Kota Mataram, Padang, Balikpapan, Manado dan Merauke.

## **I.3 Perumusan Masalah**

- a. Apakah Lembaga penyelenggara Kegiatan PKBN yang dilaksanakan oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian sudah terpadu dan sinergis tentang aktualisasi nilai-nilai bela negara.
- b. Apakah terdapat kurikulum yang sama dari SDM Pemberi materi pada penyelenggaraan PKBN.
- c. Apakah kompetensi SDM pembimbing/kader PKBN sudah memadai.

## **I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **I.4.1 Tujuan**

- a. Untuk mengetahui apakah SDM penyelenggara Kegiatan PKBN sudah terpadu dan sinergis.
- b. Untuk menetapkan cara pandang/kurikulum yang sama diantara SDM pemberi materi pada Kegiatan PKBN.
- c. Untuk mengoptimalkan kualitas SDM pembimbing/kader PKBN.

### **I.4.2 Manfaat**

Manfaat dari penelitian ini adalah terwujudnya sistem model penilaian SDM penyelenggara Bela Negara dan Kualitas SDM Pendidikan Bela Negara dengan sistem dinamik.

